

CASCADING KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

" MEMBANTU KEPALA DAERAH MEWUJUDKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DAN KELUARGA BERKUALITAS "

Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan **pelayanan kesehatan yang berkualitas** untuk semua warga masyarakat;

Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, **mendorong pengarusutamaan gender**, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah;

" URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA "

" URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK "

TUJUAN 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	TUJUAN 4 : Menurunnya Penduduk Miskin	TUJUAN 1 : Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	
INDIKATOR : 1.1 Umur Harapan Hidup 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	INDIKATOR : 4.1 Persentase Penurunan Penduduk Miskin	INDIKATOR : 1.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 1.2 Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan dan pendampingan	
SASARAN 1 : Menurunnya Usia Kawin Pertama pada Remaja; SASARAN 2 : Meningkatnya Kapasitas Program Bangsa Kencana di wilayah Sasaran Khusus; SASARAN 3 : Meningkatnya kesetaraan Keluarga Berencana (KB); SASARAN 4 : Menurunnya Keluarga Berisiko Stunting.	SASARAN 4 : Meningkatnya kuantitas Keluarga Sejahtera (KS);	SASARAN 1 : Terwujudnya Peraturan Daerah terkait Perlindungan Anak; SASARAN 2 : Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.	SASARAN 3 : Meningkatnya Jejaring Kelembagaan Pengarusutamaan Gender; SASARAN 4 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan; SASARAN 5 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Perempuan) yang Berkeadilan Gender.
INDIKATOR : 1.1 Angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP); 2.1 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK); 3.1 Persentase PUS yang ber-KB; 4.1 Angka Prevalensi Stunting	INDIKATOR : 4.1 Persentase PUS anggota Bina Keluarga;	INDIKATOR : 1.1 Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Anak; 2.1 Jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.	INDIKATOR : 3.1 Persentase Jejaring Pengarusutamaan Gender Desa/Kelurahan yang aktif; 4.1 Persentase Kelompok Perempuan Aktif dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif; 5.1 Angka Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG).

Singaraja, 3 Januari 2024

Mengetahui ;

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng



KABID. PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUHAN DAN PENERAKAN	KABID. KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTRAAN KELUARGA	KABID. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	KABID. PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN KELUARGA
SASARAN : 1.1.1 Meningkatnya Kesetaraan keluarga dalam keluarga berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; 2.1.1 Meningkatnya kapasitas program Bangsa Kencana di wilayah sasaran khusus.	SASARAN : 4.1.1 Meningkatnya Pendapatan Ekonomi Akseptor.	SASARAN : 1.1.1 Meningkatnya Desa Layak Anak yang Menerapkan PATBM dan jejaring P21P2A; 1.1.2 Meningkatnya penerapan Data Gender pada Instansi Pemerintah; 2.1.1 Terjaminnya layanan pendampingan bagi Perempuan korban kekerasan; 2.1.2 Terjaminnya layanan pendampingan bagi Anak Korban Kekerasan.	SASARAN : 3.1.1 Meningkatnya jejaring pengarusutamaan gender yang aktif; 4.1.1 Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan Perempuan; 5.1.1 Meningkatnya Desa yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga.
INDIKATOR : 1.1.1.1 Jumlah dokumen KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal; 1.1.1.2 Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana); 1.1.1.3 Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB; 1.1.1.4 Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB; 1.1.1.5 Jumlah kader yang mengikuti pergerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP). 2.1.1.1 Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga; 2.1.1.2 Jumlah data dan informasi keluarga tersedia; 2.1.1.3 Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga; 2.1.1.4 Jumlah dokumen pengolah dan pengendalian lapangan dan pelayanan KB.	INDIKATOR : 4.1.1.1 Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS); 4.1.1.2 Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS); 1.1.1.6 Jumlah orang yang mengikuti kesetaraan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP); 1.1.1.7 Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya; 1.1.1.8 Jumlah laporan pengendalian pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota; 1.1.1.9 Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB; 1.1.1.10 Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program bangsa kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal; 1.1.1.11 Jumlah laporan mekanisme operasional program bangsa kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minlok) 1.1.1.12 Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangsa kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja; 1.1.1.13 Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK.	INDIKATOR : 1.1.1.1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; 1.1.1.2 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia; 2.1.1.1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; 2.1.1.2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;	INDIKATOR : 3.1.1.1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota; 3.1.1.2 Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota; 4.1.1.1 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota; 5.1.1.1 Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

SEKRETARIS
SASARAN : 1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik.
INDIKATOR : 1.1.1 Nilai AKIP yang baik; 1.1.2 Persentase penyebaran kuesioner pengguna layanan; 1.1.3 Persentase layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan; 1.1.4 Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan; 1.1.5 Persentase layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan.

CORE BUSINESS KEPALA SKPD
 TUJUAN STRATEGIS KEPALA SKPD
 SASARAN STRATEGIS KEPALA SKPD
 INDIKATOR SASARAN STRATEGIS KEPALA SKPD
 SASARAN STRATEGIS PEJABAT SESEKON III (SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG)
 INDIKATOR SASARAN PEJABAT SESEKON III (SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG)